

PEMBANGUNAN TENAGA KERJA HIJAU UNTUK MENDUKUNG TRANSISI ENERGI DI KALIMANTAN TIMUR

ISEWGR in East Kalimantan

DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROV.KALTIM

SAMARINDA 15 OKTOBER 2025

KEADAAN KETENAGAKERJAAN DI KALIMANTAN TIMUR

NO	URAIAN	AGTS 2023	AGTS 2024	PERUBAHAN
1	PENDUDUK USIA KERJA	2 975 137	3.106.306	131.169
2	ANGKATAN KERJA	1 950 860	2.083.469	132.609
2a.	BEKERJA	1 847 295	1.976.447	129.152
2b.	PENGANGGURAN	103 565	107.022	3.457
3	BUKAN ANGKATAN KERJA	1 024 277	1.022.837	- 1440
4.	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	5,31%	5,14%	- 0,17%
5.a	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PRIA	82,82 %	83,75 %	0,93%
5.b	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA WANITA	46,86 %	49,07%	2,21%

SEKTOR USAHA YANG MENYERAP ANGKATAN KERJA (AGT 2024)

- PENINGKATAN PENYERAPAN PEKERJA
 - SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR = 19,43 %;
 - SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN SEBESAR = 17,83 %;
 - SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN = 8,52%
 - Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan kontribusi PDRB mencapai 53,24 % atau sebesar Rp.490,50 T

KONDISI SAAT INI

1. Data yang diperoleh dari aplikasi penempatan kerja on line (etam kerja) yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Prov. Kaltim permintaan pemberi kerja masih mengacu pada kondisi saat ini demikian pula pada bursa kerja offline (job fair) di Balikpapan pada tahun ini masih menunjukkan tren yang sama sesuai kondisi perekonomian Kalimantan Timur saat ini ;
2. Penurunan penyerapan tenaga kerja adalah antara lain pada sektor jasa perusahaan , keuangan dan asuransi ;
3. Terdapat penggunaan energi hijau dari pengolahan sawit untuk penggunaan mesin produksi dan kendaraan operasional namun terbatas pada kebun sawit tertentu dan masih memerlukan sertifikasi K3;

TANTANGAN

1. Perencanaan Tenaga Kerja Hijau telah menjadi bagian dari dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah namun masih memerlukan input yang dari berbagai instansi terkait mengenai permintaan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Kurikulum , sarana dan prasarana termasuk SDM Pelatihan Vokasi perlu penyesuaian dan standar baru namun kewenangan penyesuaian dimaksud bukan pada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota; dalam hal ini pemerintah daerah adalah operator kegiatan pelatihan vokasi;

AGENDA KE DEPAN

1. Melalui penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja; Daerah dinas terkait dapat dilakukan sinergi dan sebagai Tim untuk merumuskan secara utuh keperluan Tenaga Kerja Hijau dalam perspektif teknis ;
2. Forum komunikasi pelatihan dengan dunia industri (FPLID) juga dapat menjadi wahana untuk penyesuaian pelatihan bagi calon tenaga kerja hijau;
3. Serikat Pekerja yang terwakili dan diwadahi pada Lembaga Tripartit Daerah secara berjenjang dapat memberikan input bagi pengusaha dan pemerintah untuk merumuskan langkah tepat bagi pekerja dalam mempersiapkan diri menghadapi kondisi transisi energi.

**SEKIAN DAN TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT**